

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Nag). RPJMNag Desa Jatisela ini merupakan rencana strategis Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMNag tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan di dasari oleh landasan Hukum sebagai berikut :

- 1 . UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2 Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014
- 4 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah ,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
- 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Profil Desa/Kelurahan.
- 8 Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- 12 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Reviu RPJMNag Nagari Tahun 2018-2020 adalah memberikan arah bagi pemerinah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan desa yang terpadu dengan tujuan daerah sesuai visi, misi dan arah

pembanguna desa yang telah desepakati brsama sehingga menjadi efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan responfsip terhadap kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga maksudkan untuk memberikan arah terhadap pengelolaam keuangan desa, strategi pembangunan Nagari, kebijakan umum desa dengan rencana kerja dalam kerangka anggaran dan kerangka regulasi yang bersipat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan. Sedangkan tujuan disusunnya RPJMNag Nagari

Koto Nan Duo IV Koto Hilie Tahun 2018-2020 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana strategis pembangunan pemerintah Nagari dan sebagai dokumen perencanaan lainnya.

1.4 Manfaat

Penyusunan Dokumen Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Koto Nan Duo IV Koto Hilie ini mempunyai mamfaat sebagai berikut :

1. Manfaat RPJMNag.

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Nagari yang merupakan acuan Pembangunan Nagari
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Nagari.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian dokumen Reviu RPJMNag akan menjadi sebuah pedoman induk pembangunan dan dijadikan sebagai bahan acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakna selama satu tahun terakhir, karena merupakan sinkronisasi perencanaan pembangunan Nasional, Daerah, dan Nagari yang juga merupakan Acuan atau Pedoman dalam pembangunan Nagari secara sistematis, terukur dan terencana.

1.5 Pengertian

Istilah dan singkatan dalam dokumen:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
 2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
-
1. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Nagari bersama dengan Wali Nagari.
3. Keputusan Wali Nagari adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
4. Reviu RPJMNagari : Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
5. RKPNag : Rencana Kerja Pembangunan Nagari
6. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
7. RAPBNag : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
8. DURKPNag : Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari
9. Perencanaan adalah Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada
10. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
11. Arah pembangunan daerah adalah Strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Nagari
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
13. Kebijakan adalah arah / tindakanyang diambil oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan
14. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga – lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran / kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh lembaga Nagari.
15. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut Reviu RPJMNag adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1(Satu) tahun Nagari dalam wilayah

1.6 Sistematika Penyusunan

RPJMNag Koto Nan Duo IV Koto Hilie tahun 2018-2020 terdiri dari IX BAB dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, Maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, hubungan RPJMNag dengan dokumen Perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan RPJMNag.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menguraikan kondisi geografis, administrasi, sosial kependudukan serta pencapaian pembangunan 1 (Satu) tahun terakhir di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie.

BAB III : VISI DAN MISI

Menguraikan Visi dan Misi Wali Nagari terpilih, tujuan pembangunan serta sasaran yang ingin di capai di akhir tahun RPJMNag.

BAB IV :TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran Wali Nagari terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMNag

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN NAGARI

Menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan sebelumnya dan kerangka pendanaan guna menyongsong pembangunan tahun berikutnya.

BAB VII :KEBIJAKAN UMUM

Menguraikan kebijakan umum dari masing-masing strategi dan arah kebijakan daerah yang dipaparkan pada bab sebelumnya menuju terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB VIII : PEROGAM PEMBANGUNAN NAGARI

Menguraikan program pembangunan desa dari masing-masing masing-masing bidang pembagunan antara lain bidang penyelenggaraan pemerintah Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pemberdayaan masyarat, dan bidang pembinaan masyarakat Nagari dan arah kebijakan Nagari yang dipaparkan pada bab sebelumnya menuju terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB II GAMBARAN NAGARI KOTO NAN DUO

2.1 SEJARAH NAGARI

Sejarah Nagari

Sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk Batang Kapas pada umumnya datang dari Sungai Pagu, mereka turun dari Sungai Pagu mengalir Sungai Kambang Lengayang, dari Kambang mereka pergi ke Selatan yaitu ke Pelangai Balai Selasa, Punggasan sampai ke Air Haji. Sebagian lagi mereka ini, dari Kambang bergerak ke Utara, ada yang berdiam di Amping Parak, Surantih, Taratak, Taluk dan sampai ke Koto Tuo Batang Kape, mereka sampai di Batang Kapeh diperkirakan lebih kurang pada abad ke 14.

Rombongan yang menetap di Koto Tuo Batang Kape, adalah terdiri dari Suku yang empat, yaitu Suku Panai, Suku Caniago, Suku Kampai, dan Suku Melayu. Kepala Rombongan Suku Panai adalah Naradin Datuak Batuah, Kepala Rombongan Suku Caniago adalah Datuak Kando Marajo, Kepala Rombongan Suku Kampai adalah Datuak Bandaro Hitam, sedangkan Kepala Rombongan Suku Melayu adalah Datuak Sati.

Robongan yang empat ini dipimpin oleh Naradin Datuak Batuah sebab Dia kerabat Raja dari Alam Surambi Sungai Pagu, yang disebut juga Raja yang Empat Alam Surambi Sungai Pagu, dengan Gelar Tuanku Rajo Disambah dari Raja Melayu, Tuanku Rajo Batuah dari Raja Panai, Tuanku Rajo Bagindo dari dari Raja Kampai, dan Tuanku Rajo Melenggang dari Raja Tiga Laras.

Rombongan dibawah pimpinan Naradin Datuak Batuah ini mulai membangun kampung untuk tempat tinggal secara bergotong royong, kampung kampung yang pertama mereka bangun adalah Kampung Panai (Balik Parik), kampung yang kedua adalah Kampung Caniago (Buah Kajai), kampung yang ketiga mereka bangunan adalah Kampung Kampai (Pasar Kuok) dan kampung yang keempat mereka bangun adalah Kampung Melayu (Kuok), sehingga disebut juga kampung Nan Ampek, yaitu Kampung tertua di Koto Salapan Batang Kape.

Kemudian pada tahun-tahun berikutnya berdatangan juga keluarga dari Surian, Solok Salayo, melalui Bayang dan Tarusan dan ada juga dari Nagari-nagari lainnya seperti padri Padang, Pariaman, mereka terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Jambak, Suku Koto, Suku Caniago, Suku Melayu, Suku Sikumbang, Suku Balaimansiang dan Suku Tanjung. Pada umumnya menurut adat, merka yang datang belakangan ini diberi wilayah atau tanah oleh suku yang empat, atas persetujuan pimpinan dari Suku yang Empat.

Dengan berkembang dan bertambahnya penduduk, maka bertambah pula kampung-kampung dari persatuan kampung-kampung itu terbentuklah Koto Tuo dengan wilayahnya yaitu : Kampung Panai (Balik Parik), Kampung Caniago (Buak Kajai), Kampung Kampai (Pasar Kuok), kampung Melayu (Kuok), keempat kampung ini disebut juga kampung Nan Ampek dan selanjutnya Kampung Teliang, kampung Talo Banto, Kampung Rumah Tinggi, Kampung Koto, Kampung melayu, Kampung Inunang, Kampung Tanjuang, Kampung Sumua Gadang, kampung Pinang, kampung Limau Sundai, Kampung hilir, Kampung jalan Baru, Kampung Ubo, Kampung Bukit Tambun Tulang, Muaro salah satu pelabuhan Banda Sapuluah, kampung-kampung ini semuanya terletak disebelah Selatan dari Kampung Nan Ampek. Sedangkan yang ke Utara dari Kampung Nan Ampek yaitu : Bengke, Kampung Jambak, Kampung Jalamu, Kampung Ladang, Kampung Pulau, kampung Karan, Kampung Idung Mancuang, Kampung Kapalo Banda, Kampung Induriang dan kampung Puncak Bukit Pulai dan lain-lainnya, kesemua kampung-kampung tersebut diatas masuk wilayah Koto Tuo, dan disebut juga Koto yang tertua.

Perkembangan dan pertambahnya penduduk diluar Koto Tuo, maka lahir pula Koto yang kedua yaitu : Koto Anakan. Kampung-kampung yang termasuk wilayah Koto Anakan adalah Kampung Lansano, Kapung Gurun, Kampung Lua, Kampung Barua, Kampung Panai (Parik), Kampung Koto, Kampung Melayu, Kampung Jambak, Kampung Kabun, Kampung Sungai Jania, Kampung Subarang Patai, Kampung Pondok, Kampung Suduik, Kampung Sapan, Kampung Pandan, kampung Sungai Tawa, Kampung Subarang Sawah, dan Kampung-kampung kecil lainnya.

Kemudian lahir Koto yang ketiga, yaitu Koto Kalumpang Limau manis, sekarang bernama Nagaro Koto Nan Tigo, yang termasuk Koto Nan Tigo adalah Kampung Kalumpang, Kampung Limau Manis, Kampung Pasar Gompong, Kampung Koto Baru, Kampung Tarandam, Kampung Rawang tanah Kare, Kampung Talao Salang, Kampung Gunung Kaciak, Kampung Solok, Kampung Ampang Tigo, Kampung Kaciak, Kampung Koto, kampung Kotolua, Kampung Koto Dalam, Kampung Bukit Putui, Kampung Banda Ubo, Kamuang Tanah Taban, dan kampung kecil lainnya.

Kemudian lahir Koto yang keempat, yaitu Koto Taluk Kasai, Sungai Bungin, yang termasuk Koto Taluk Kasai Sungai Bungin, adalah Kampung Taluk Kasai, Kampuang Sungai Bungin, Kampuang Muaro, Kampuang Kasiek Putih, Kampuang Labuang Baruak, Kampuang Taluk Batung, Kampuang Tampunyeik, Kampuang Barua, Kampuang Bopet, Kampuang Pukatan, Kampuang Dalam dan lain-lain.

Kemudian bertambah lagi Koto yang kelima yaitu : Koto Lubuk Nyiur, sudah itu bertambah lagi Koto yang keenam yaitu : Koto Taratak Tapatih, selanjutnya bertambah lagi Koto yang ketujuh yaitu : Koto Tuik, dan kemudian bertambah lagi Koto yang kedelapan yaitu : Koto Sungai Nyalo, karena sudah ada delapan Koto, maka disebutlah Nagari Koto Salapan, dengan ibukotanya Kampuang Panai Kototuo.

Kemudian Kotosalapan, lebih kurang tahun 1365 M, berdirilah sebuah kerajaan air papan, yang didirikan oleh Naradin Datuak Batuah, sekaligus menjadi raja pertamanya dari kerajaan Kuala Air Papan, dengan gelar Tuanku Rajo Batuah, yang menjadi bundo kandungnya adalah adiknya Puti Teno, Puti Teno inilah yang menurunkan raja-raja Panai pada kerajaan Kuala Air Papan sampai tahun 1560 M.

Tuanku Rajo Batuah sebagai raja di kerajaan Kuala Air Papan, sekaligus dipercaya sebagai pemimpin Banda Sepuluh dan sekitarnya, oleh raja yang empat dari kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu, sebagai raja ibadat atau disebut juga Imam Banda Sapuluh dan sekitarnya, wilayahnya adalah Bayang, Painan, Koto Salapan sampai Air Haji.

Yang dimaksud dengan Banda Sapuluh, adalah sepuluh Pelabuhan Laut yang dimulai dari pusat Kerajaan Air Papan, yaitu : Banda yang pertama adalah Pelabuhan Muaro Koto Salapan, Banda yang kedua ialah Pelabuhan Taluk, Banda yang ketiga ialah Pelabuhan Surantih, Banda yang keempat adalah Pelabuhan Amping Parak, Banda yang kelima adalah Pelabuhan Kambang, Banda yang keenam adalah Pelabuhan Lakitan, Banda yang ketujuh adalah pelabuhan Palangai Balai Salasa, Banda yang kedelapan adalah Pelabuhan Sungai Tunu, banda yang kesembilan adalah Pelabuhan Punggasan, Banda yang kesepuluh adalah Pelabuhan Air Haji.

Tetapi dari tahun 1560 M sampai dengan tahun 1667 M, kerajaan Kuala Air Papan dikuasai oleh Aceh, sehingga kerajaan-kerajaan yang ada di Banda Sapuluh berdiri sendiri-sendiri, Aceh menempatkan seorang Panglima disetiap Banda Sapuluh sebagai wakil Aceh.

Dizaman pemerintahan Aceh inilah mulai timbul nama Batangkape atau Batangkapas, karena kerajaan Kuala Air Papan, hasil utamanya adalah kapas dan lada, menurut keterangan dari orang tua-tua, ada sebatang pohon kapas tumbuh besar dan tinggi di Balai Tambun Koto Tuo, dipinggir Sungai Kuala Air Papan, sehingga Kuala Air Papan berubah nama menjadi Batang Kapas (Batang Kape), sedangkan Sungai Kuala Air Papan berubah namanya menjadi Sungai Batang Kapas.

Pada tahun 1667 M sampai dengan 1680 M, pemerintah Kuala Air Papan (Batang Kapas) kembali masuk wilayah kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu, Belanda mulai menjalankan politik adu dombanya kepada rakyat Batang Kapas.

Batang Kapas adalah salah satu kota Banda sapuluh, dari segala jurusan Batang Kapas merupakan tempat penting untuk menjual hasil-hasil bumi dari pedalaman atau dari daerah yang lebih ke selatan. Batang Kapas sendiri selain dari ikan, hasilnya adalah kapas dan lada.

Pemimpin Batang Kapas mengadakan gerakan yaitu tanaman lada diganti saja dengan tanaman kapas, untuk dijual kepada Inggris, sebab dagangan kapas lebih menguntungkan dari dagang lada. Namun gerakan ini tercium oleh Belanda, penanaman kapas dipersulit, rakyat dipaksa menanam lada kembali, sedangkan tanaman kapas dibinasakan.

Apa yang terjadi ketika harga lada jatuh, rakyat Batang Kapas menderita, apalagi tanaman kapas sudah terlanjur dibinasakan oleh rakyat karena politik adu domba Belanda.

Sehingga rakyat gelisah, tidak senang kepada pemimpin setempat dan memberontak kepada pemimpin Batang Kapas.

Akhirnya VOC Belanda memaksa pemimpin Batang Kapas untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada VOC Belanda, karena menurut VOC Belanda, kemeralatan atau kemiskinan, kesusahan dan kegelisaan rakyat disebabkan oleh penguasa pribumi tak mampu memimpin rakyatnya, bukan disebabkan oleh VOC Belanda.

Demikian disebarkan informasinya kepada rakyat, sehingga rakyat percaya dan tidak senang kepada pemimpin pribumi, yaitu pemimpin yang memimpin Batang Kapas waktu itu.

Berdasarkan perjanjian VOC Belanda dengan raja pagaruyung pada tahun 1668, yaitu VOC Belanda telah ditunjukkan sebagai Mantri Raja, untuk mewakili raja Minangkabau di wilayah Pantai Barat, untuk menggantikan pemerintahan Aceh. Maka Batang Kapas berdasarkan taktik adu domba VOC Belanda, dan berdasarkan perjanjian VOC Belanda dengan raja Minangkabau itu, pemimpin Batang Kapas atas raja Pagaruyung menyerahkan Batang Kapas kepada VOC Belanda pada tahun 1680 M, sehingga Belanda mendirikan kantor perwakilannya di Batang Kapas, maka resmilah VOC Belanda memerintah Batang Kapas, dari tahun 1680 M sampai dengan tahun 1799 M dengan gelar Mantri Raja.

Batang Kapas pada zaman kolonial Belanda, yaitu dari tahun 1800 M sampai dengan tahun 1918 M berbentuk Distrik Batang Kapas, wilayahnya adalah : Koto Salapan, Taluk, Taratak, Surantih, dan Amping Parak.

Batang Kapas pada zaman kolonial Belanda , yaitu dari tahun 1918 M sampai dengan tahun 1942 M, juga berbentuk distrik Batang Kapas.

Koto Salapan berdasarkan surat Assistant Resident Painan tanggal 28 Maret 1917, No.893/24, diajukan kepada Resident Sumatera Barat, untuk membagi Koto Salapan dalam rangka pemekaran Nagari, menjadi dua Nagari, yaitu Nagari IV Koto Hilir dan Nagari IV Koto Mudik.

Akhirnya disetujui oleh Resident Sumatera Barat, dengan suratnya tanggal 5 April 1917 M, No. 5075, sekaligus mengeluarkan surat keputusannya, untuk Nagari IV Koto Hilir tanggal 24 April 1918, No. 193, maka hari jadi IV Koto Hilir adalah tanggal 24 April 1918 M, dengan ibukotanya Koto Tuo.

Kemudian untuk nagari IV Koto Mudiek tanggal 7 Juni 1918 M, No. 310, maka hari jadi IV Koto Mudiek adalah tanggal 7 Juni 1918 M, dengan ibukotanya Koto Lubuk Nyiur.

Sehingga Distrik Batang Kapas mempunyai wilayah 6 Nagari, yaitu : Nagari IV Koto Hilir, Nagari IV Koto Mudik, Nagari Taluk, Nagari Taratak, Nagari Surantih dan Nagari Amping Parak.

Batang Kapas diwaktu Nagari pulang ke adat yang telah disetujui oleh kolonial Belanda dari tahun 1914 M, untuk pembaruan pemerintahan, yaitu Belanda hendak melaksanakan politik etis atau politik balas jasa, karena atas jasa rakyat Indonesia, Belanda mendapatkan keuntungan besar, khususnya di Minangkabau, umumnya di Indonesia, maka dilancarkan gerakan untuk pendidikan rakyat, transmigrasi (pindah ke tempat baru) dan irigasi (perbaikan pengairan sawah rakyat), maka

pemerintahan Nagari diserahkan kepada kaum adat, maka Nagari Koto Salapan dan Nagari lain bermunculan Datuk-Datuk baru, yang mana dari tahun 1914 M – 1917 M, selama 3 tahun berlomba-lomba mendirikan datuk-datuk baru, sebagai contoh di Nagari Koto Salapan tadinya ada 12 orang Datuk, sehingga menjadi 64 orang Datuk.

Batangkapas diwaktu Nagari pulang ke adat, pada zaman kolonial Belanda yaitu dari tahun 1918 M – tahun 1922 M, masih berbentuk distrik, dengan wilayah masih tetap yaitu : IV Koto Hilir, IV Koto Mudik, Taluk, Taratak, Surantih, dan Amping Parak, setiap Nagari diperintah oleh penghulu kepala, atau Angku Palo.

Batang Kapas pada zaman kolonial Belanda sudah berbentuk onder distrik, yaitu dari tahun 1922 M – 1942 M, ibukota onder distrik adalah Pasar kuok, wilayahnya masih tetap yaitu : IV Kotohilir, IV Kotomudik, Taluk, Taratak, Surantih, dan Amping Parak. Batang Kapas pada zaman pemerintahan Jepang yaitu dari tahun 1942 M – 1945 M, berbentuk Fukugun Batang Kapas, dengan wilayahnya masih tetap yaitu : IV Koto Hilir, IV Koto Mudik, Taluk, Taratak, Surantih, dan Amping Parak.

Batang Kapas pada zaman Republik Indonesia dari tahun 1945 M – 2001 M.

1. Batangkapas pada zaman orde lama dari tahun 1945 M – tahun 1966 M, berbentuk kecamatan, diperintah oleh seorang camat, dengan Ibukota Pasar Kouk, wilayah masih tetap yaitu : IV Koto Hilir, IV Koto Mudik, Taluk, Taratak, surantih, dan Amping Parak, setiap Nagari diperintah oleh Wali Nagari.

2. Batang Kapas pada zaman orde baru, dari tahun 1966 M – tahun 1995 M, berbentuk kecamatan diperintah oleh seorang Camat, dengan Ibukota Pasar Kuok, dan dibantu oleh Camat Perwakilan Batang Kapas yang berkedudukan di Surantih, wilayah Kecamatan Batangkapas masih tetap yaitu : IV Koto Hilir, IV Koto Mudik, Taluk, Taratak, Surantih, dan Amping Parak.

Dan kemudian Batang Kapas pada tahun 1996 M, menjadi dua kecamatan yaitu : Kecamatan Batang Kapas, ibukotanya Pasar kuok, wilayahnya adalah IV Koto Hilir, IV Koto Mudik, dan Taluk, sedangkan Kecamatan Setera, ibukotanya Surantih, wilayahnya yaitu : Taratak, Surantih, dan Amping Parak.

Batang Kapas pada masa pemerintahan para kepala desa, dari tahun 1983 M – tahun 2001 M, Nagari IV Koto Hilir 11 desa yaitu :

1. Desa Koto Tuo
2. Desa Pasar Kuok
3. Desa Jalamu
4. Desa Limau sundai
5. Desa Bukik Tambun Tulang
6. Desa Anakan
7. Desa Sapan
8. Desa Koto Nan Tigo
9. Desa Taluk Kasai
10. Desa Sungai Bungin
11. Desa Taluk Batung

Pada tahun 1994 M diadakan penyederhanaan desa, yaitu dari 11 desa menjadi 8 desa, yaitu :

1. Desa koto Tuo
2. Desa Pasar Kuok Jalamu
3. Desa Limau Sundai
4. Desa Bukik Tambun Tulang
5. Desa Anakan Sapan
6. Desa Koto Nan Tigo
7. Desa Taluk Kasai Sungai Bungin
8. Desa Taluk Batung

Batangkapas pada zaman orde Reformasi dari tahun 2001 M – sekarang.

Batangkapas dari tahun 2001 M sampai sekarang, sudah kembali kepada Nagari, dengan Ibukota Pasar kuok, wilayahnya adalah Nagari IV Koto Hilir, Nagari IV Koto Mudik, dan Nagari Taluk, pulaunya adalah pulau Batu Dandang, pulau Batu Nago, pulau Karabak Gadang, pulau Karabak ketek, pulau Panyu, bukitnya adalah Bukuit Payung, Bukit Gadih Basanai, Bukit tambun Tulang (Gunung Salasie), Bukit Si Gading, Bukit Rawang, Bukit Lintang, Bukit Pulai, Bukit Biawak, Bukit Taratak, Bukit AU, Bukit Btu Nago.

Taluknya adalah Taluk Kasai, Taluk Batung, dan Taluk. Sungaiya adalah sungai Batangkapas (Sungai Kuala Air Papan), Sungai Jalamu, dan Sungai Taluk.

Buminya mengandung Minyak dan Gas, juga Batubara, dan juga air terjunnya adalah air terjun Bukit Gadih Basanai. Air terjun Koto Gunung Tuik sebanyak empat air terjun, yang mana tinggi jatuh airnya 80 meter dari atas kebawah.

Batangkapas diperintah oleh seorang Camat, dan tiga Wali Nagari.

Batangkapas berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan IV Jurai Painan

Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Setera – Surantih

Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Solok Selatan – Muarolabuah

Sebelah Barat berbatas dengan Selat Mentawai, kabupaten Mentawai, lautan Indonesia.

Pada Tahun 2007, saat akan diadakan pemilihan Wali Nagari maka berkembanglah isu pemekaran Pemerintahan Nagari, melalui kesepakatan masyarakat di setiap kampung yang ada dalam Nagari IV Koto Hilie menyatakan sepakat untuk melakukan Pemekaran pemerintahan nagari. Penantian panjang masyarakat nagari IV Koto Hilie berakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 dan 13 Tahun 2009, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie dan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, adapun Kampung-kampung yang termasuk Wilayah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie adalah :

1. Kampung Sapan ;
2. Kampung Anakan ;
3. Kampung Taluk Kasai, dan
4. Kampung Sungai Bungin.

2.1.1 Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

1. Luas Nagari : 16,64 km (96,43 Mil)
2. Jarak Total : 23,72 Km (14,72 Mil)

Tanah Sawah :

- A. Sawah Irigasi : 101,0 ha
- B. Sawah Irigasi $\frac{1}{2}$ teknis : 79,0 ha
- C. Sawah Tadah Hujan : – ha
- D. Tanah kering ;
- E. Tegal / ladang : 16,95 ha
- F. Pemukiman : 16,95 ha
- G. Tanah basah ;
- H. Tanah rawa : – ha
- I. Tanah surut : – ha
- J. Tanah Perkebunan ;
- K. Tanah Perkebunan Rakyat : 15,0 ha
- L. Tanah Perkebunan Negara : – ha
- M. Tanah Perkebunan Swasta : – ha
- N. Tanah fasilitas umum ;
- O. Kas Nagari : – ha
- P. Perkantoran Pemerintah : 0,15 ha
- Q. Lapangan : 0,100 ha
- R. Tanah bengkok :
- S. Wali Nagari : 1 Orang
- T. Sekertaris Desa : 1 Orang
- U. Kaur : 2 Orang
- V. Kasi : 2 Orang
- W. Kepala Kampung : 4 Orang
- X. 2. Tipologi Desa ;
- Y. Desa Pantai (–)
- Z. Desa pegunungan (–)
- AA. Desa Perkotaan (–)

Batas wilayah desa sebagai berikut :

- A. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Samudera Indonesia
- B. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari IV Koto Hilie

- C. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari IV Koto Hilie
- D. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari IV Koto Hilie

3. Orbitasi ;

- A. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 19 Km
- B. Jarak ke Ibukota kecamatan : 2 Km

4. Iklim ;

- A. Curah hujan :Mm
- B. Suhu rata – rata : C
- C. tinggi tempat : Mdl
- D. Bentang wilayah : Datar

2.1.2 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Jumlah Penduduk ;

2.2 Jumlah Total : 6931 Orang

- A. . Jumlah laki – laki : 3112 Orang
- B. .Jumlah Perempuan : 2773 Orang
- C. .Jumlah KK : 2014 KK
- D. .Jumlah Penduduk Miskin : 518 Orang

b. Pendidikan ;

- A. Belum Sekolah : 1046 Orang
- B. Usia 7- 45 tidak pernah sekolah :Orang
- C. Pernah sekolah SD tetapi tdk Tamat :Orang
- D. Tamat SD / Sederajat : .1384 Orang
- E. Tamat SLTP : 957 Orang
- F. Tamat SLTA : 1305.Orang
- G. Tamat D 1 : 20 Orang
- H. Tamat D 2 : 49 Orang
- I. Tamat D 3 :Orang
- J. Tamat S 1 : 144 Orang
- K. Tamat S 2 : 8 Orang

(data di profil desa) C. Mata Pencarian Pokok ;

Petani : 520 Orang

Buruh tani : 78 Orang

Buruh swasta : 138 Orang

PNS : 54 Orang

Pengrajin : Orang

Pedagang : 29 Orang

Peternak : 03 Orang

Nelayan : 260 Orang

Montir : 06 Orang

Dokter :Orang

Para medis : – Orang

d. Agama

Islam : 6.916 Orang

Kristen : Orang

Katolik : Orang

Budha : Orang

Hindu : Orang

E. Etnis

Jawa :Orang

Negro : Orang

2.2 POTENSI KELEMBAGAAN 1. Lembaga Pemerintahan Desa ;

Jumlah Perangkat Nagari : 11 Orang

Pendidikan Wali Nagari : S1

Pendidikan Sekretaris Nagari : SMA

Pendidikan Staf Nagari : SMA – S1

– Kaur Perencanaan : SLTA

– Kaur Keuangan : S1

– Kaur tata Usaha & Umum : S1

– Kasi Pemerintahan : SMA

– Kasi Kesra : SMK

– Kasi Pelayanan : SLTA

Jumlah Kampung : 4 Kampung

Jumlah Dusun : 12 Dusun

2. Lembaga Pendidikan ;

Jumlah TK : 3 unit

Jumlah PAUD : 4 unit

Jumlah SD sederajat : 5 unit

Jumlah SMP sederajat : 1 unit

Jumlah PKBM : unit

3. Kelembagaan Keamanan ;

Jumlah Pos Kamling : 8 unit

Jumlah Hansip/sejenisnya : Orang

4. Jenis Sarana dan Prasanana

Balai Desa : Ada

Kondisi Balai Desa : Baik

Jumlah mesin ketik : buah

Jumlah Computer /Laptop : 4 Unit

Jumlah mesin hitung : 3 buah

Jumlah meja : 7 buah

Kondisi : Baik

Jumlah kursi : 12 buah

Kondisi : baik

Jumlah Almari : 5 buah

Jumlah buku Administrasi : 25 buah

Kondisi : Terisi/kadang kadang/penuh

Kendaraan Dinas : ada

BAB III VISI DAN MISI

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan Visi Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ini

dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie seperti Pemerintah Nagari, BAMUS, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Nagari seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Batang Kapas mempunyai titik sektor Pertanian, dan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie merupakan daerah tujuan wisata maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie adalah : **“ TERWUJUDNYA Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie YANG AMAN, SEHAT, CERDAS, BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN BERAKHLAQ MULIA “**

3.2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie adalah :

- 1) Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie.
- 2) Meningkatkan kesehatan, kebersihan Nagari serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah.
- 3) Mewujudkan, meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Nagari yang baik.
- 4) Meningkatkan Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Nagari dan daya saing Nagari.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dengan menggerakkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Nagari serta meningkatkan Produksi rumah tangga kecil.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di Nagari.
- 7) Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran dan saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie.
- 8) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat Nagari.

VISI

PENJELASAN PERKATA

AMAN : Masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie merasakan kondisi aman di wilayahnya sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan di Nagari

SEHAT : Meningkatkan kesehatan, kebersihan Nagari serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah

CERDAS : Masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie yang cerdas serta memiliki kebersamaan dalam membangun Nagari .

BERDAYA SAING : Masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie disarankan mampu untuk mengembangkan potensi Nagari dan berdaya saing di segala bidang

BERBUDAYA : Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran dan saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie.

BERAKHLAQ : Masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie diharapkan mempunyai Ahklaq

MULIA : mulia dan saling menghargai antar semua masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Nagari
4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumberdaya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.

4.2. Sasaran

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila.
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian Nagari, serta terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal guna meningkatkan mobilitas perekonomian.
3. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan taraf pendidikan.
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang PARIWISATA, pertanian, industri, dan perdagangan.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

7. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN NAGARI

5.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NAGARI KOTO ANN DUO IV KOTO HILIE

Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie telah memperoleh sejumlah kemajuan dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui program pembangunan yang terarah, terencana, sistematis dan sinergis. Indikator pengentasan kemiskinan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat Nagari.

Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie secara umum adalah bagaimana membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pendidikan dan kesehatan, bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata, mengurangi tingkat kemiskinan, melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan Nagari, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

5.1.1 Masyarakat yang mandiri dan sejahtera

1. Sektor pendidikan

Merupakan salah satu komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran sentral bersama-sama dengan sektor kesehatan dan ekonomi. Kondisi saat ini Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie masih ada warga yang buta aksara, warga usia sekolah yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi karena terbentur dengan biaya, masih banyak warga masyarakat usia dini yang belum tersentuh oleh pendidikan karena terbatasnya akses pendidikan usia dini di Nagari. Kegiatan belajar mengajar taman kanak-kanak dan Sekolah Menengah yang dikelola oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Pendidikan Usia Dini (PAUD) masih di kelola dengan swadaya masyarakat, di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie sudah berjalan dan sudah beberapa kali menamatkan siswa-siswinya dalam tiap tahun anggaran namun masih terbentur dengan belum tersedianya sarana gedung untuk belajar dan mengajar yang saat ini masih numpang di Rumah Masyarakat Kampung Teluk Kasai dan di rumah warga. Bidang pendidikan agama untuk warga masyarakat masih di kelola dan di fasilitasi oleh Taman Pendidikan Al-Qura'an (TPQ) di masing-masing dusun dengan beberapa permasalahan antara

lain keterbatasan Sumber Daya manusianya, keterbatasan sarana gedung dan keterbatasan sarana pendukung kelengkapan belajar mengajarnya.

1. Bidang Kesehatan

a) Di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ada beberapa indikator yang menjadi prioritas penanganan menjadi yang permasalahan serius di tengah masyarakat seperti masyarakat yang belum memahami dan belum mencerminkan Perilaku Hidup Bersih (PHBS) karena masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan karena belum tersedianya tempat pemuangan sampah (TPS),

masih banyak warga lansia belum mendapat fasilitas pelayanan kesehatan, di 9 (Sembilan) posyandu yang tersebar di masing-masing Kampung wilayah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie masih banyak pencapaian target yang masih belum tercapai untuk kesehatan balita dan ibu hamil dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat Nagari.

b) Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat Nagari walaupun trendnya cenderung meningkat menurut data kabupaten

1. Bidang Sosial Budaya

Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai budaya serta kearifan local dalam pembangunan belum optimal. Budaya dan kearifan local yang ada sebatas event, festival, dan kegiatan serimonial saja yang belum mampu masyarakat wujudkan secara sistematis diaktualisasikan dalam program pembangunan Nagari. Permasalahan yang dihadapi seperti terkikisnya nilai-nilai gotong-royong, masih kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Nagari baik dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharanya.

2. Bidang Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian yang masih dihadapi adalah masih belum optimalnya fungsi lembaga yang bergerak di bidang pertanian seperti Gabungan kelompok Tani (GAPOKTAN), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan kelompok Tani Nagari, Pola tanam petani masih belum teratur, Program yang diterima dari pemerintah daerah masih banyak yang belum mencapai sasaran, sehingga berdampak kepada hasil pertanian yang masih rendah yang belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat petani di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie. Untuk

Sarana Persarana pertanian sudah banyak yang sudah tersedia seperti Hand traktor, bantuan pupuk, bantuan bibit dan saluran irigasi yang sudah dibangun untuk kelancaran pengairan bagi petani.

3. Bidang kemasyarakatan

a) Permasalahan yang masih ada sampai saat ini adalah masih banyak warga Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya untuk memiliki rumah yang layak huni dan sehat menurut standar kesehatan.

b) Masih banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan akses sarana air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

4. Bidang Ekonomi

Permasalahan yang dihadapi Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie sampai saat ini adalah taraf kehidupan kesejahteraan warga masyarakat Nagari yang masih dikategorikan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah dilihat dari mata pencaharian warga yang masih bekerja menjadi Buruh Nelayan, Buruh Pertanian, buruh harian lepas, pedagang kecil, dan sector kecil lainnya. Beberapa faktor penyebabnya adalah masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, serta kurangnya modal untuk berusaha sehingga belum mampu untuk bersaing mencari nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

5. Bidang Lingkungan hidup

a) Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan masih kurang perdulinya masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara mandiri mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sampai saat ini pemerintah Nagari belum mampu mengimbangi keterangkutan dan pengelolaan sampah karena belum memiliki mobil pengangkut sampah, belum memiliki tempat pembuangan sampah dan belum ada masyarakat yang mampu secara berkelanjutan dalam pengelolaan daur ulang sampah.

b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya konservasi sumber daya alam serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan yang masih belum produktif

6. Bidang Kependudukan

1) Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk yang lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.

2) Ketimpangan persebaran penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis.

3) Pertambahan penduduk di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie grafiknya cenderung meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49%/tahun, ini belum di imbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

4) Kepemilikan Administrasi Kependudukan masih rendah, baik dalam hal Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta-akta kependudukan lainnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat di rumuskan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie kurun waktu enam tahun kedepan yang di katagorikan dalam tiga Aspek yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Nagari

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, sejumlah isu yang ditetapkan masuk aspek kesejahteraan rakyat sebagai berikut:

a) Gangguan kamtibmas bernuansa SARA masih berpotensi terjadi.

b) Pertumbuhan ekonomi Nagari yang belum optimal.

c) Angka kemiskinan masih tinggi.

d) Relatif tingginya angka pengangguran.

e) Angka buta huruf masih tinggi.

f) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah.

g) Usia harapan hidup masih rendah.

h) Rumah tidak layak huni masih tinggi.

2. Aspek Pelayanan Umum

Dalam rangka berupa memperbaiki pelayanan umum sebagai tugas utama penyelenggaraan pemerintahan, dapat di uraikan beberapa isu di bawah ini:

- a) Penegakkan PerNag belum optimal.
- b) Pelaksanaan tugas pemerintahan yang bersih dan baik belum optimal.
- c) Penyelenggara administrasi pelayanan publik masih belum optimal.
- d) Masih kurangnya target pencapaian di 9 Posyandu.
- e) Masih terdapatnya prevalensi kurang gizi..
- f) Masih rendahnya minat baca dan kunjungan ke perpustakaan desa.
- g) Rumah tangga yang menggunakan air bersih masih rendah.
- i) Rumah tangga yang menggunakan listrik masih rendah.
- j) Penyediaan jaringan irigasi belum optimal.
- k) Rumah tangga dengan sanitasi layak masih rendah.
- l) Pencemaran kualitas air sungai masih tinggi.
- m) Konservasi sumber mata air belum optimal.
- n) Pengelolaan sampah belum optimal.
- o) Pengelolaan Wisata yang memiliki potensi menjadi prioritas nagari.
- p) pengembangan Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing.

3. Aspek Daya Saing

Sebagai ikhtiar pemerintah Nagari dalam meningkatkan daya saing, beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

- a) Peningkatan pendapatan asli Nagari belum optimal
- b) Nilai investasi Nagari masih rendah
- c) Rendahnya pertumbuhan industri kecil
- d) Kemantapan jalan belum optimal.
- e) Pemanfaatan ruang yang sesuai Kepala Kampung belum terlaksana.

Secara umum, isu strategis yang di hadapi oleh Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ke depan dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a) Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan aktualisasi budaya.
- b) Pemerataan infrastruktur wilayah.
- c) Angka kemiskinan dan masalah sosial.
- d) Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
- e) Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan Nagari.
- f) Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

6.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie dari, transfer dana desa (DD), dan alokasi dana desa (ADD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah Nagari yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dalam Peraturan nagari. Dalam hubungannya dengan RPJM-Nagari, APBNag menjadi komitmen penyelenggaraan pemerintah Nagari untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun. Arah kebijakan keuangan Nagari yang diambil oleh Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie mengandung makna :

- 1. Arah belanja APBNag Koto Nan Duo IV Koto Hilie digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategi jangka menengah 6 tahunan;
- 2. Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan Nagari diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah memadai.
- 3. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

6.2. Arah Pengelolaan Belanja Nagari

Suatu arah pengelolaan belanja Nagari dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBNag. Belanja Nagari dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan tidak langsung.

6.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus

anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penjualan kekayaan desa dan pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan

digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.

6.4. Kebijakan Umum Anggaran

Menurut Permendagri no. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa harus dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Mengacu pada peraturan tersebut, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa, dan selanjutnya APBDesa tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan desa. Oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran desa, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan Nagari dalam kurun waktu 6 tahun (2020-2026) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan kebijakan Pemerintah Nagari, maka pembangunan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie dibagi menjadi dua tahapan pembangunan, yaitu tahap perwujudan masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie yang lebih sejahtera lahir dan batin (2020-2026), dan tahap kelanjutan peningkatan pelayanan publik (2020-2026).

A. Tahapan Perwujudan Masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie yang lebih sejahtera

Tahap ini merupakan peningkatan kemampuan masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie yang lebih sejahtera.

1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Penguatan keterampilan dan kewirausahaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan kerukunan antar umatberagama dan kesetiakawanan social.
7. Peningkatan program pro rakyat.
8. Peningkatan kesadaran umum.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
10. Perintisan dan pengembangan industry kecil, perdagangan, pariwisata dibidang pertanian, pariwisata bidang pegunungan/perbukitan.
11. Peningkatan kelestariah wilayah hutan dan perbukitan.

12. Peningkatan kualitas hasil pasar dan pemasaran

B. Tahapan Kelanjutan Peningkatan Pelayanan Publik

Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie tahun 2020-2026. Serta percepatan peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap ini adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi.
2. Peningkatan jalan potensial ekonomi.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan pendidikan terjangkau.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur kepentingan umum.
7. Penyediaan tempat distribusi barang dan jasa.
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.
9. Peningkatan promosi untuk menarik investor dibidang industry, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.
10. Mempermudah perizinan dan memfasilitasi investor yang bergerak dibidang industry, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program Pembangunan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun kedepan. Program pembangunan dirumuskan menurut acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang mengkaitkan pada Misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020 – 2026, sebagai berikut :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
2. Operasional Pemerintahan Nagari
3. Tunjangan dan Operasional BAMUS

4. Insentif Kepala Kampung
5. Pendataan Nagari
6. Pengadaan Media Transfarasi Nagari
7. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
8. Pengelolaan Informasi Nagari
9. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari
10. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari
11. Penyelenggaraan Kerjasama antar Nagari
12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Nagari
13. Kegiatan lainnya yang sesuai kondisi Nagari.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari, antara lain :

- a. Jalan Permukiman
- b. Jalan Nagari antar permukiman kewilayah pertanian
- c. Lingkungan permukiman masyarakat Nagari
- d. Infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kondisi Nagari

2. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaansarana dan prasarana kesehatan, antara lain :

- a. Air bersih berskala Nagari
- b. Sanitasi lingkungan
- c. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan
- d. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi Nagari

3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, antara lain :

- a. Taman bacaan masyarakat
- b. Pendidikan anak usia dini
- c. Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat
- d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan
- e. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kondisi Nagari

4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :

- a. Penguatan ekonomi Masyarakat
- b. Penguatan permodalan BUM Nagari
- c. Pembibitan tanaman pangan
- d. Penggilingan padi
- e. Pngeloaan limbah sampah, kayu, dan lain-lain
- f. Lumbung Nagari
- g. Pembukaan lahan pertanian
- h. Kolam ikan dan pembenihan ikan
- i. Kandang ternak
- j. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan Nagari

5. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain :

- a. Pembersihan aliran Kampung/Nagari
- b. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Nagari
- a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
 - 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - 2. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
 - 3. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - 4. Pembinaan lembaga sadar hukum dan adat
 - 5. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - 6. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat
 - 7. Kegiatan lain sesuai kondisi Nagari
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
 - 2. Pelatihan teknologi tepat guna
 - 3. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis bagi kepala Nagari, perangkat Nagari, BAMUS, Kepala Kampung

4. Meningkatkan kapasitas masyarakat, antara lain :

- a. Kader pemberdayaan masyarakat Nagari
- b. Kelompok usaha ekonomi produktif
- c. Kelompok perempuan
- d. Kelompok tani
- e. Kelompok masyarakat miskin
- f. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
- g. Kelompok pemuda
- h. Kelompok lainnya sesuai kondisi Nagari

c. Bidang Tak Terduga

1. Wabah penyakit

2. Bencana alam

Kegiatan masing-masing bidang selama enam tahun kedepan dapat dilihat pada matrix Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie terlampir.

BAB IX PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) ini diharapkan akan dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan pembangunan di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie untuk jangka Enam tahun kedepan. Demikian pula kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan segenap SKPD-nya diharapkan untuk dapat memadukan program masing-masing dengan program pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMNag ini. RPJM Nagari merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tahun 2020 -2026 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Nagari. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua Tim Penyusun dan Tim Pendamping Pedesaan Kecamatan Batang Kapas serta semua Pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terlibat dalam Penyusunan RPJMNag ini, semoga semua ini akan mampu membawa perubahan yang jauh lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya.